

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil. Negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti, di bagian utara Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, negara Singapura dan negara Filipina, di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia, Sedangkan di sebelah timur Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Keadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki perbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti yang tadi telah disebutkan di atas, mengharuskan Indonesia memiliki pertahanan perbatasan negara yang cukup kuat untuk menjaganya. Selain itu dengan kondisi wilayah negara yang cukup luas juga, Indonesia membutuhkan angkatan bersenjata yang cukup kuat dengan jumlah yang banyak dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk menangani permasalahan dalam negeri.

Untuk menunjang tugas angkatan bersenjata Indonesia dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia, tentunya diperlukan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang memadai. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya dalam pengadaan alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Indonesia mengadakan kerjasama bilateral dengan pemerintah Federasi Rusia. Kerjasama ini selain didasari oleh Rusia sebagai negara pemilik produsen alutsista ternama seperti Sukhoi Corporation, Mikoyan-Gurovich, dan Izhevsk Machine-Building Plant, tetapi juga didasari oleh hubungan bilateral yang berjalan dengan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Rusia.

Hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia diawali dengan M.Hatta mengirim surat kepada pemerintah Uni Soviet menjawab surat pemberitahuan dari pihak Uni Soviet tertanggal 25 Januari 1950 bahwa Uni Soviet akan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan menetapkan hubungan diplomatik dengan negara ini. M. Hatta menulis bahwa pihak Indonesia sangat menghargai pengakuan ini dan siap memulai perundingan tentang penetapan hubungan diplomatik. Sedemikian, tanggal 3 Februari 1950 dianggap sebagai tanggal penetapan hubungan diplomatik antara kedua negara<sup>1</sup>.

Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Rusia sempat meredup setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965 dan mulainya zaman “Orde Baru”, namun pada 1991 Rusia mengalami proses transisi baik di dalam negeri maupun mengenai prioritas politik luar negerinya. Rusia, yang tidak lagi memproyeksikan politik luar negerinya dalam skala global, kecuali di bidang pelucutan senjata, mulai mengembangkan hubungan kemitraan dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat, mengalami deideologisasi dan pendekatan pragmatisme.

Keadaan tersebut membuat Rusia melakukan peninjauan hubungannya dengan berbagai negara di dunia termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk menjalin kembali hubungan bilateral yang sempat membeku

---

<sup>1</sup>[http://www.indonesia.mid.ru/60years/02\\_i.html](http://www.indonesia.mid.ru/60years/02_i.html), diakses pada tanggal 26 Januari 2012 pada pukul 19.30

dengan pemerintah Indonesia. Hingga pada akhirnya setelah kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke Rusia, dan pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov pada September 2002 melahirkan komitmen baru bagi masing-masing negara untuk memasuki tahapan hubungan dan kerjasama yang baru.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke Rusia mempunyai arti yang sangat penting bagi hubungan bilateral kedua negara, karena kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia semenjak runtuhnya Uni Soviet.

Hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dengan Rusia mengalami peningkatan setelah kunjungan Indonesia ke Rusia pada bulan April 2003, yang di tandai dengan penandatanganan Deklarasi Kerangka Kerja Hubungan Persahabatan dan Kemitraan Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21, serta sejumlah kesepakatan lainnya. Kesepakatan itu meliputi kerjasama teknik militer, perbankan dan kerjasama teknologi luar angkasa.

Pada saat bersamaan, kedua belah pihak sedang mempersiapkan berbagai persetujuan bilateral untuk kerjasama di bidang penggunaan nuklir dengan maksud damai, perikanan, pariwisata, usaha kecil-menengah, kesehatan, olah raga dan pendidikan.

Pada saat ini kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi kekurangan atau di bawah *minimum essential force*, bahkan apabila disejajarkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia. Indonesia berada pada posisi terbawah, rendahnya kemampuan untuk

menerapkan teknologi terbaru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah rusak dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 persen); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 persen) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 persen); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 persen) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 persen) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 persen) yang siap untuk dioperasikan.<sup>2</sup>

Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka baik kuantitas maupun kualitas serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar itu, kekuatan angkatan bersenjata Indonesia sangat kekurangan untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara secara optimal.

Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada

---

<sup>2</sup>Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 Buku II, (Jakarta: BAPPENAS, 2006) Bab 6 halaman 2.

pembentukan *minimum essential force*. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI telah mengalami peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 sebagai langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasikan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan.

Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, mulai dicari kemungkinan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sehubungan dengan embargo alutsista berkepanjangan dari Amerika Serikat terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Upaya pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri juga mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Pelaksanaan pencabutan embargo suku cadang dan alutsista TNI yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan tercapainya beberapa kerjasama di bidang militer semakin meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Namun, ketergantungan terhadap teknologi dan industri militer luar negeri yang rawan oleh embargo merupakan sebuah permasalahan yang masih di hadapi oleh

pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Untuk mengatasi ketergantungan terhadap alutsista dari negara pemasok yang rentan akan embargo, maka pada pertengahan 2006 pemerintah Republik Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman dari pemerintah Federasi Rusia dalam pengadaan alutsista. Hal tersebut dilakukan dengan mekanisme pembiayaan yang terbilang lebih murah apabila di bandingkan melalui fasilitas kredit ekspor yang selama ini di gunakan demi mencukupi kebutuhan alutsista TNI.

Beberapa negara lainnya yang berpotensi untuk dapat di jadikan sumber pasokan alutsista bagi TNI diantaranya adalah China, Korea Selatan, Cekoslovakia, dan Polandia yang tergolong relatif tidak mempermasalahkan proses penanganan keamanan dalam negeri Indonesia, serta hasil produksi alutsista negara-negara tersebut memiliki kualitas yang tidak kalah baik bila dibandingkan dengan Amerika dan Rusia.

Selain itu dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI dalam meningkatkan kemampuan penangkalan (*deterrence effect*) dari adanya gangguan keamanan, kebijakan pemerintah terhadap meningkatkan dan mengutamakan peran industri pertahanan nasional baru-baru ini dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI merupakan salah satu cara juga untuk menghindari terjadinya embargo dari negara pemasok alutsista yang ada, karena bila kita lihat produksi industri militer dalam negeri yang dimiliki sekarang ini seperti PT. PINDAD, PT. Dirgantara Indonesia, dan PT. PAL, hasil-hasil produksi dari perusahaan tersebut tidak mengecewakan dan dapat menandingi atau disejajarkan dengan hasil-hasil produksi militer negara-negara lain, terbukti dengan adanya kepercayaan dari

negara-negara lain untuk membeli alutsista produksi industri militer Indonesia untuk melengkapi persenjataan angkatan bersenjata negara-negara tersebut, seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan Timor Leste. Pemanfaatan industri militer dalam negeri juga dapat berguna dalam menangani keterbatasan keuangan negara terhadap pengadaan alutsista-alutsista dari negara luar yang memiliki harga mahal.

Upaya untuk memodernisasi alutsista dan memenuhi minimum essential force bermanfaat untuk menjaga kedaulatan NKRI dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran perbatasan oleh negara tetangga yang sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia baik perbatasan darat, laut, maupun udara. Hal tersebut juga dapat menangani dan meminimalisir dari terjadinya konflik-konflik bersenjata yang dilakukan separatis-separatis atau kegiatan gerakan-gerakan radikal yang menjurus kepada terorisme yang sampai saat ini masih banyak terjadi di wilayah negara Indonesia, dimana hal itu dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Selain untuk menjaga kedaulatan NKRI, pengadaan alutsista tersebut dapat bermanfaat bagi TNI untuk di pergunakan dalam melakukan operasi-operasi diluar operasi militer, seperti operasi penanggulangan bencana alam atau pencarian-pencarian korban kecelakaan pesawat di daerah pegunungan seperti yang sering kali terjadi di negara Indonesia, alutsista-alutsista yang akan di datangkan dari Rusia tersebut diharapkan bisa mempermudah para anggota-anggota TNI atau para relawan dalam menyalurkan bantuan dan pertolongan secara cepat kedaerah-daerah yang memiliki akses jalan terputus atau sulit untuk di lewati kendaraan-kendaraan biasa yang ada, seperti pada kejadian bencana alam

di Aceh, bencana alam di Nias, dan kecelakaan pesawat di wilayah pegunungan Irian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengajukan judul dalam bentuk skripsi dengan judul **“KERJASAMA INDONESIA – RUSIA DALAM PENGADAAN ALUTSISTA DAN KAITANNYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DAN PERTAHANAN INDONESIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Federasi Rusia dalam pengadaan Alutsista TNI?
2. Mengapa Indonesia lebih memilih Rusia untuk melakukan pengadaan alutsista bagi TNI?
3. Bagaimana kondisi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia setelah diadakannya kerjasama antara pihak Indonesia dengan Rusia dalam pengadaan alutsista TNI?.

### **1. Pembatasan Masalah**

Dengan Sedemikian banyaknya permasalahan yang ada, Maka peneliti mencoba untuk membatasi penelitiannya pada dua variable : variable pertama, adalah penelitian ini akan memusatkan pada usaha untuk menjelaskan bagaimana kondisi industri militer rusia dan sejauh mana kerjasama Indonesia – Rusia dalam pengadaan alutsista. Variable kedua, adalah penelitian ini akan memusatkan pada usaha untuk menjelaskan kondisi stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia terkait dengan pengadaan alutsista dari Rusia.



## 2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah di pilih yang merupakan *research problem*, maka dari itu, penulis berusaha menarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

**“Kerjasama apa saja yang dilakukan antara Indonesia dengan Rusia dalam pengadaan alutsista militer Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia?”**

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kerjasama antara Indonesia dengan Rusia dalam bidang militer
2. Untuk mengetahui kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang tertarik terhadap masalah keamanan nasional dan pertahanan nasional, selain dari hal itu kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi yang baik bagi bidang pertahanan dan keamanan nasional, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat dari bangku kuliah.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) Hubungan Internasional.
3. Untuk memberikan masukan atau memberikan kontribusi yang baik terhadap permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan di negara Indonesia.
4. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lain yang akan datang.

### **D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang diperlukan dan agar dapat mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis menggunakan teori-teori dari para pakar yang ada dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebuah negara di dunia ini tidak dapat berdiri tentunya tanpa adanya bantuan dari negara lain. Definisi negara sendiri menurut Soenarko “*Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan*

*negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan*”.<sup>3</sup> Maka dari itu sebuah negara membutuhkan hubungan yang baik dengan negara lain untuk menjalin kerjasama demi mencapai tujuan bersama. menurut Stanley Hoffman dalam bukunya “*Contemporary Theory in International Relations*” menyatakan bahwa “*ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara*”.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian ilmu Hubungan Internasional menurut **Mas’oed** dalam bukunya “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi (LP3ES, Jakarta) suatu kerangka analisis menyatakan istilah Hubungan Internasional*” dijelaskan sebagai berikut:

**“Untuk memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki hubungan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non-negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional”.**<sup>5</sup>

Melihat pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa, Hubungan Internasional terjadi karena adanya saling ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya. Sementara itu, Hubungan Internasional menurut Robert Gilpin adalah “*Hubungan Internasional ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu ekonomi politik internasional yang lebih menghadap pada politik keamanan militer yang seimbang*”.<sup>6</sup>

<sup>3</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diakses pada tanggal 26 January 2012 pada pukul 20.00

<sup>4</sup>Stanley Hoffman, (ed). 1960. *Contemporary Theory in International Relations*. New Jersey: Englewood Cliffs, Hal. 6.

<sup>5</sup>Mas’oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994) hal. 28.

<sup>6</sup><http://greenpeace-blogger.blogspot.com/2011/05/definisi-hubungan-internasional-menurut.html>, diakses pada tanggal 27 January 2012, pada pukul 09.00

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa, Hubungan Internasional tidak hanya membahas tentang ekonomi atau politik suatu negara saja tetapi Hubungan Internasional mengkaji tentang pertahanan dan keamanan suatu negara juga, hal ini juga di perjelas oleh John Herz dalam pernyataannya “*Hubungan internasional adalah mengidentifikasi hubungan internasional sebagai konsep yang membahas tentang kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian semua rakyatnya*”.<sup>7</sup>

Selain itu studi Hubungan Internasional dinyatakan oleh Chris Brown sebagai berikut “*for some International Relation means the diplomatic-strategys relation of states, and the characteristic focus of International Relation is on issues of war and peace, conflict, and cooperation*”.<sup>8</sup>Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa adanya konflik dan kerjasama dalam tujuan utama dalam sebuah Hubungan Internasional.

Dalam menjalankan Hubungan Internasional sangat diperlukan adanya politik internasional suatu negara.Politik internasional disini sebagai alat untuk mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan, tujuan dan kekuasaan suatu negara. Menurut Patrick M. Morgan dalam bukunya “*Theories and Approaches to International Politics: What are we to think*” bahwa “*Apabila politik adalah studi tentang who gets what, when, and how, maka politik internasional adalah studi mengenai who gets what, when, and how dalam arena internasional*”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Chris Brown, *Understanding International Relation* (New York: Palgrave, 2001), hlm 1.

<sup>9</sup>Patric M. Morgan. 1987. *Theories and Approaches to International Politics: What are we to think?*.New Brunswick: Transaction Books, hal. 10-14.

Sedangkan menurut **K.J. Holsti** dalam bukunya yang berjudul “*Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*” menyatakan bahwa:

“Studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional, deterrence, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi”.<sup>10</sup>

Dalam berjalannya sebuah politik internasional harus di tunjang juga oleh politik luar negeri yang baik dari negara tersebut. Sebelum kita membahas politik luar negeri lebih jauh kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu politik, Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya, sedangkan definisi politik menurut **Andrew Heywood** dalam bukunya “*Politics*” menyatakan bahwa:

“Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (*Politics is the activity through which a people which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*)”.<sup>11</sup>

Setelah kita mengetahui apa itu politik secara umum, baru kita dapat melanjutkan untuk mempelajari secara mendalam apa itu politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu, politik luar negeri pada dasarnya merupakan *action theory*, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai,

<sup>10</sup>K.J Holsti. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, hal. 26.

<sup>11</sup>Andrew Heywood, *Politics* (London: Macmillan Press, 1997) hlm. 4.

sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam dunia internasional.

Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** dalam bukunya "*Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaanya Dewasa ini*" menyatakan bahwa:

**"Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan politik luar negeri merupakan suatu aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasarannya yang jangka pendek dan jangka panjang".<sup>12</sup>**

Dengan kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai *input* yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>13</sup>

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau

---

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaanya Dewasa ini* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983). hal 55.

<sup>13</sup>James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171, 173.

unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>14</sup>

**K.J Holsti** memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

**“1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.**

**2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (short-term), jangka menengah (middle-term), dan jangka panjang (long-term).**

**3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain”.**<sup>15</sup>

Hal lain yang saling berhubungan dengan tujuan politik luar negeri suatu negara adalah kepentingan nasional (*national interests*) yang dapat di definisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis:

**“1. Core/basic/vital interests; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestraikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari core/basic/vital interests ini.**

**2.Secondary Interests, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapinya melalui jalan perundingan misalnya”.**<sup>16</sup>

Berkurangnya kapasitas internasional Amerika Serikat yang terjadi seiring dengan kebangkitan peran dan pengaruh sejumlah negara, seperti Rusia, China, India, serta negara-negara Uni Eropa (UE), mendorong terjadinya pergeseran keseimbangan kekuatan dunia. Di tengah-tengah persaingan pengaruh global dan regional antara negara-negara besar, maka adaptasi terhadap kemungkinan terbentuknya tatanan dunia multipolar semakin penting, terutama bagi negara-

<sup>14</sup>Jack C. Plano dan Roy Olton.1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal 5.

<sup>15</sup>Bruce Russet dan Harvey Starr. 1998. *World Politics: The Menu for Choice*. 2<sup>nd</sup>ed. New York: W.H Freeman and Co., hal 190-193.

<sup>16</sup>Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani.2006. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 52.

negara berkembang, yang memiliki kapasitas dan pengaruh terbatas untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara, negara-negara tersebut atau aktor-aktor dari negara tersebut harus melakukan sebuah kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kerjasama dalam ilmu Hubungan Internasional dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia, pihak pemerintah Indonesia melakukan sebuah kerjasama bilateral dengan pemerintah Federasi Rusia. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Rusia berada dalam bidang militer, untuk dilakukannya pengadaan alutsista dari pihak Rusia terhadap TNI, yang bertujuan mengisi kesenjangan jumlah serta teknologi alutsista yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara-negara lainnya khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu bagi Indonesia dengan adanya kerjasama militer bersama akan memberikan peningkatan terhadap kapabilitas militer Indonesia.

Dalam sebuah kerjasama yang dilakukan antara negara yang satu dengan yang lain, dibutuhkan sebuah strategi untuk dipakai oleh masing-masing negara untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional negaranya. Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” (stratos =militer dan ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang, definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clausewitz. Maka tidak perlu heran



apabila istilah strategi sering kita ketemui dalam dunia militer, pengertian strategi secara umum dalam Wikipedia Indonesia, ensiklopedia berbahasa Indonesia adalah “*pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu*”.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut **E.J. Kington Mc. Cloughry** dalam bukunya “*Global Strategy*” mengemukakan pengertian tentang strategi sebagai berikut:

- “ 1. In peace, strategy seeks to prevent war or to get what is wanted nationally, without hostilities.**
- 2. In war, its functions imposes or tries to impose on the activity of war a purpose, a plan and a method.**
- 3. Strategy is based on Defiance Policy and embraces the assignment of the various national military task in peace and war. It consists the keeping of those in phase with development of situations”.**<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian strategi di atas, pada saat ini strategi tidak hanya digunakan oleh pihak militer dalam kondisi peperangan, tetapi di gunakan juga dalam hal politik, sosial maupun ekonomi dalam kondisi damai, seperti halnya yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata.

---

<sup>17</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, diakses pada tanggal 27 Januari 2012 pada pukul 20.30

<sup>18</sup>Ade Priangani dan Oman Heryaman.2003. *Kajian Strategis Dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia*. Bandung: Centre for Political and Local Autonomy Studies FISIP Universitas Pasundan Bandung. Hal 16.

Menurut Walter Lippmann menyatakan bahwa, “*a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war*”.<sup>19</sup>

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Menurut **Barry Buzan**, bahwa:

“**keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut**”.<sup>20</sup>

Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut **Liota P. H**, didalam bukunya yang berjudul “*Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security*” menyatakan:

“**Secara etimologis, konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin “*securus*” (*se + cura*), artinya terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*). Bisa juga bermakna dari gabungan kata *se* (artinya tanpa atau *withouth*) dan *curus* (artinya *uneasiness*). Sehingga, apabila digabungkan akan bermakna “*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*”.<sup>22</sup>**

<sup>19</sup>Walter Lippmann, *US Foreign Policy: Shield of the Republic* (Little Brown, Boston, 1943). Hal 51

<sup>20</sup>Buzan, Barry. 1991. *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hempstead: Harvester Wheatsheaf, hal 2-3.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Liota P. H (2002), *Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security*, dalam *Security Dialogue*, Vol. 33. No. 4. Hlm. 473-488

Menurut **Abdul-Monem M. Al-Mashat**, Dalam bukunya yang berjudul *“National Security in the Third World”* bahwa:

“ Berbagai literatur Studi Keamanan, masalah pendefinisian konsep “keamanan” menjadi salah satu topik perdebatan yang hangat, setidaknya sampai berakhirnya Perang Dingin. Dalam hal ini, perdebatan akademik mengenai konsep “keamanan” ini berkisar seputar dua aliran besar, yakni antara definisi strategis (*strategic definition*) dan definisi non-strategis ekonomi (*economic non-strategic definition*). Definisi yang pertama umumnya menempatkan “keamanan” sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara, dan umumnya berdimensi militer. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek non-militer dari fungsi negara”.<sup>23</sup>

Sedangkan Menurut Barry Buzan didalam bukunya *“People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World”* menyatakan bahwa, *“Keamanan juga sering dipahami sebagai upaya negara untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan penangkal (deterrent)”*.<sup>24</sup> Dari pernyataan tersebut bisa kita ketahui bahwa definisi keamanan sering kali berkaitan oleh asumsi dengan kekuasaan tertinggi dari kekuatan militer sebagai sarana untuk melindungi suatu negara dari ancaman militer negara luar.

Keamanan suatu negara selalu berdampingan dan berhubungan dengan pertahanan negara tersebut, pertahanan secara umum adalah reaksi dari suatu badan terhadap sebuah serangan, dan melalui ekstensi segala cara dan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko atau bahaya, demikian pula dengan perlindungan dan tanggapan.

---

<sup>23</sup> Abdul-Monem M. Al-Mashat, *National Security in the Third World* (Boulder, Col.: Westview Press, 1985), hal. 19.

<sup>24</sup> Barry Buzan, *“People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World,”* dalam Azar dan Moon, ed. *National Security*, hal. 15.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama antara sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin keamanan wilayahnya, perlindungan dari ancaman-ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri atau untuk menjaga kepentingan-kepentingannya. Hal ini sesuai dengan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Berdasarkan perananan TNI tersebut, TNI sebagai alat pertahanan negara seperti yang dikutip dalam situs [www.TNI.Mil.id](http://www.TNI.Mil.id) berfungsi sebagai:

- “a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;**
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan**
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.”<sup>25</sup>**

Berdasarkan fungsi dan peranan TNI di atas maka bisa didefinisikan bahwa militer adalah sebuah organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi di atasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) untuk membela atau mempertahankan negaranya dari ancaman aktual ataupun hal-hal yang dianggap ancaman. Sehingga bila berbicara militer kita juga akan selalu berbicara mengenai negara.

Militer seringkali berfungsi dan bekerja sebagai sebuah masyarakat dalam masyarakat (*societies with in societies*) dengan memiliki komunitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan lain-lainnya sendiri.

---

<sup>25</sup>[www.TNI.Mil.id](http://www.TNI.Mil.id), diakses pada tanggal 28 Januari 2012 pada pukul 13.00

Untuk menunjang segala fungsi dan tugas yang dimiliki oleh TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara, tentunya TNI harus di tunjang oleh alutsista yang berteknologi canggih serta mencukupi. Dalam **Wikipedia Indonesia**, ensiklopedia berbahasa Indonesia, Senjata didefinisikan sebagai:

“suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik”.<sup>26</sup>

Pengadaan alutsista dari Rusia terhadap TNI merupakan langkah yang baik bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia, hal ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh untuk menjaga stabilitas pertahan dan keamanan negaranya dengan memoderenisasi alutsista yang ada demi mencapai *minimum essential force*. Menurut **Samuel P. Huntington** dalam bukunya “*Militer dan Politik*” terjemahan **Burhan Magenda**, menjelaskan mengenai kekuatan militer sebagai berikut:

“Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa meyeritakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Dan militer adalah suatu profesi sukarela adalah suatu profesi sukarela memilih perkerjaan didalamnya, namun ia juga bersifat memaksa, karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi”. (2002: 83)

Dalam pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa setiap orang memiliki kekuatan atau *power* yang berbeda-beda. Hal ini berlaku juga terhadap negara, jika negara tersebut memiliki angkatan bersenjata yang kuat serta memiliki

---

<sup>26</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, diakses pada tanggal 28 Januari 2012, pukul 14.00

stabilitas keamanan dan pertahanan yang baik, maka negara tersebut tentu akan memiliki *power* yang cukup untuk memberikan pengaruh negaranya di dalam wilayah kawasan negara tersebut.

Kecanggihan teknologi senjata yang dimiliki oleh setiap negara secara tidak langsung adalah salah satu usaha mereka untuk saling mengimbangi dalam hal kekuatan pertahanan, hal ini pada akhirnya juga akan berpengaruh pada keputusan luar negeri yang akan dijalankan suatu negara. Oleh karena itu masuknya alutsista dengan teknologi terbaru ke Indonesia secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap kebijakan yang diberikannya di kawasan Asia Tenggara. Adanya korelasi antara kecanggihan teknologi senjata dengan keputusan luar negeri yang akan di jalankan oleh suatu negara diungkapkan juga oleh Budiono Kusumohamidjojo sebagai berikut:

**“ Hubungan antara perkembangan teknologi persenjataan dengan pembuat keputusan politik luar negeri merupakan hubungan searah yang positif, artinya kemajuan yang dicapai oleh suatu negara dalam penguasaan teknologi kesenjataan hanya akan berpengaruh positif terhadap proses pembuatan politik luar negeri, artinya kemajuan kuantitatif maupun kualitatif di bidang arsenal negara pasti akan memperbanyak alternatif bagi pelaksanaan politik luar negeri ”.**<sup>27</sup>

Adanya situasi anarki pada saat ini yang melahirkan permasalahan keamanan, memaksa negara-negara untuk melakukan beberapa kebijakan yang di anggap penting untuk menangani permasalahan tersebut, karena pada saat ini sudah tidak ada jaminan keamanan lagi dari negara-negara kuat seperti Amerika dan Rusia terhadap para pengikut aliran politik mereka. Kebijakan yang dianggap penting dalam menangani permasalahan tadi antara lain dengan cara meningkatkan kekuatan militer negaranya atau membentuk aliansi dalam bentuk

---

<sup>27</sup>Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis, Erlangga, Jakarta, 1987. Hal 51.

pakta pertahanan (*collective defence*) dengan negara lain, seperti yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Uni Eropa demi menjaga stabilitas keamanan negara dan kawasannya.

Namun bagi wilayah ASEAN, mereka tidak mentransformasikan dirinya terhadap sebuah komunitas pertahanan berdasarkan pendekatan *collective defense*, namun ASEAN berpegang pada prinsip *comprehensive security* yaitu tidak membatasi security hanya pada dimensi militernya tetapi juga menyeluruh ke segala aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

*Comprehensive security* mencakup pula ide mengenai penanganan ancaman non-tradisional terhadap keamanan seperti terorisme, perdagangan gelap narkoba, perdagangan dan penyeludupan manusia terutama wanita dan anak-anak, pencucian uang, serta penyelundupan senjata. Komunitas keamanan semacam inilah yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman stabilitas keamanan yang akan datang.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut penulis mengemukakan asumsi sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pertahanan dan keamanan yang baik bagi sebuah negara, sangat menentukan ke arah mana kebijakan politik luar negeri negara demi menjaga dan melindungi kawasan serta kedaulatan negaranya.
2. Pengadaan alutsista yang akan dilakukan oleh Indonesia, sepatutnya di sesuaikan dengan kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, termasuk dalam menangani ancaman-ancaman baru yang akan muncul dimasa yang akan datang.

3. Kebijakan pemerintah Rusia dalam kerjasamanya dengan Indonesia ditandai dengan diberikannya kredit negara yang dapat di gunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memodernisasi dan memenuhi kebutuhan alutsista TNI yang saat ini jauh dari batasan *minimum essential force*.

## 2. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis membuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

**“Jika kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia dalam pengadaan alutsista bagi TNI berjalan dengan lancar, maka kondisi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia akan tercapai, ditandai dengan berkurangnya pelanggaran perbatasan serta konflik-konflik yang sering terjadi di wilayah Indonesia dan bertambahnya kekuatan alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI”.**

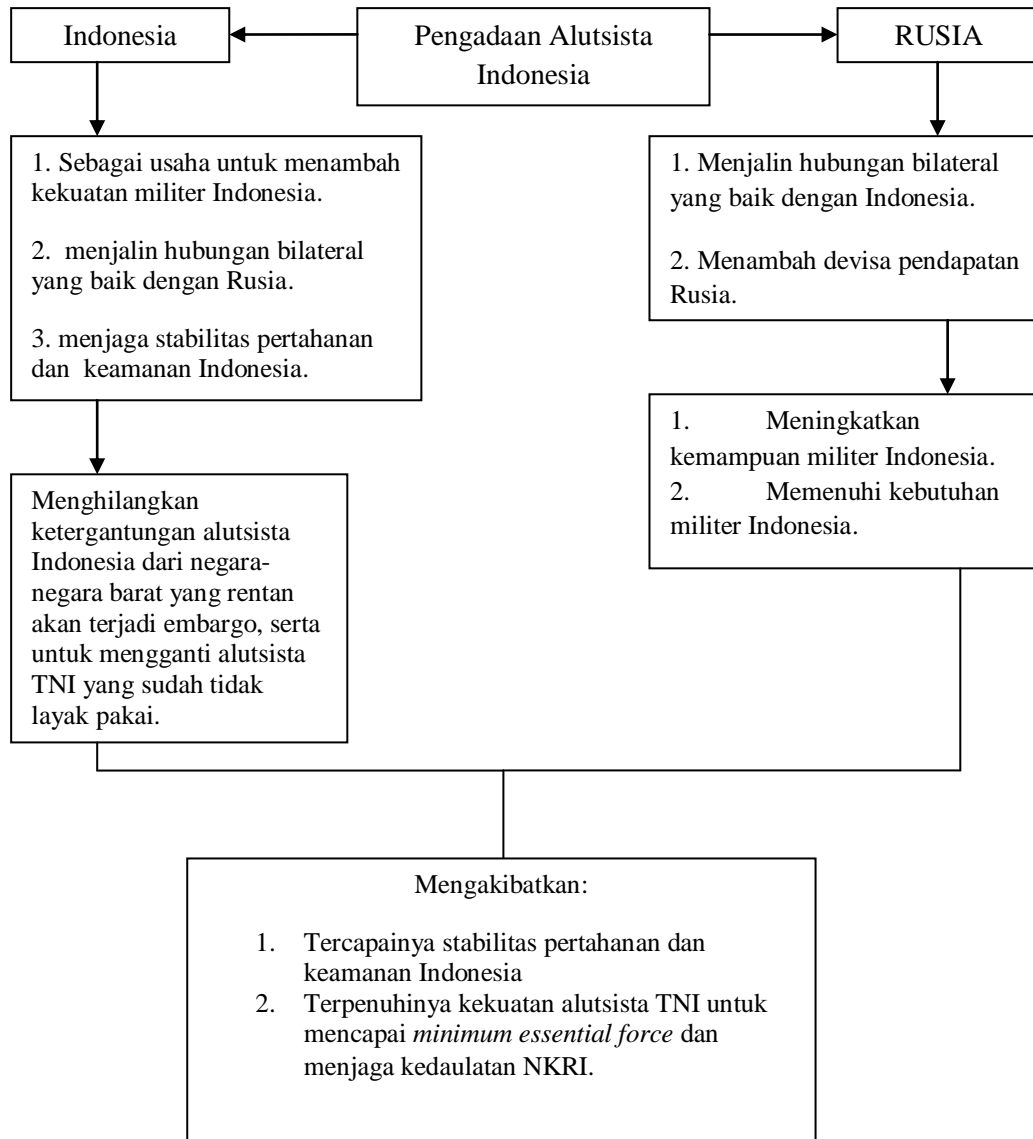


### 3. Tabel Operasional Variabel

Variable	Indikator	Konsep Analisis
Variable Bebas: Jika kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Federasi Rusia dalam pengadaan alutsista bagi TNI berjalan dengan lancar	1. Adanyakerjasama antara indonesia dengan rusia dalam pengadaan alutsista.	1. Data tentang kerjasama antara Indonesia dengan Rusia dalam pengadaan alutsista.
Variable Terikat: maka kondisi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia akan tercapai, ditandai dengan berkurangnya pelanggaran perbatasan serta konflik-konflik yang sering terjadi di wilayah Indonesia dan bertambahnya kekuatan alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI	1 .Kondisi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia.  2. Adanya perkembangan kekuatan TNI	1. Data tentang pertahanan dan keamanan Indonesia  2 Data tentang kekuatan yang di miliki TNI.

Tabel 1.1

#### 4. Skema Kerangka Teoritis



## **E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Tingkat Analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasionis, model induksionis dan model reduksionis. Namun dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model Analisa Korelasionis dimana unit eksplanasinya dan unit analisisnya berada pada tingkatan yang sama, yaitu pengadaan alutsista terbaru bagi TNI yang sangat di butuhkan oleh Indonesia sedangkan hal yang sangat diinginkan oleh Rusia adalah tambahan devisa negara serta dapat menghidupkan terus kelangsungan industri militer negaranya.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode deskriptif analisis. Maksud dari metode ini adalah suatu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data, kemudian dianalisis. Dan merupakan bentuk studi pendekatan dari Deskriptif analisis yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji Hipotesis ataupun membuat prediksi tertentu. Tujuan dari penelitian Deskriptif analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suatu masalah.

Pengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang. Dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cermat mengenai kegiatan kerjasama Indonesia – Rusia dalam pengadaan alutsista dan kaitannya terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat-kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

## **F. Lokasi Penelitian dan Lama Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

- a. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung  
Jln. Lengkong Dalam II No. 17D Bandung.
- b. Perpustakaan Universita Katolik Parahyangan Bandung  
Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
- c. Perpustakaan SESKOAD  
Jln. Jenderal Gatot Subroto Bandung.

### **2. Lama Penelitian**

Adapun lamanya rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan penulis kurang lebih 6 bulan terhitung sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Juli 2012.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan merupakan garis besar masalah yang akan diteliti oleh penulis. Berikut adalah uraian tersebut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berisikan latar belakang peneitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

### **BAB IITINJAUAN UMUM MENGENAI KERJASAMA ANTARA INDONESIA DAN RUSIA**

Bab ini membahas mengenai bagaimana kondisi industri militer Rusia dan adanya kerjasama antara pihak Indonesia dengan pemerintah Federasi Rusia, terhadap pengadaan alutsista Indonesia untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjatannya.

### **BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA**

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai bagaimanan kondisi militer Indonesia dan kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia.

### **BAB IV KONDISI STABILITAS KEAMANAN DAN PERTAHANAN INDONESIA, TERKAIT ADANYA PENGADAAN ALUTSISTA DARI RUSIA**

Pada bab ini membahas bagaimana kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia sebelum dan setelah di adakananya kerjasama antara Indonesia dengan Indonesia dalam pengadaan alutsista, apakah ada pengaruh yang signifikan

terhadap kondisi keamanan dan pertahanan negara, setelah terjadinya kerjasama pengadaan alutsista oleh Indonesia, selain itu di bab ini juga di jelaskan pengadaan apa saja yang telah dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang membuat indonesia tertarik untuk membeli alutsista dari Rusia dan hambatan apa saja yang diahapi dalam kerjasama pengadaan ini.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan yang singkat, jelas, dan informatif serta pengujian terhadap hipotesis.